



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas perkenannya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 yang menggantikan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Secara substantif, LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 merupakan gambaran dari capaian kinerja selama Tahun 2025 yang sudah diselesaikan, didalamnya memuat tentang capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan, faktor penghambat dan pendukung, yang kesemuanya adalah wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Melalui LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dapat diukur pencapaian misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Laporan kinerja yang merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh



stakeholder (BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat);

2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Kami menyadari masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya senantiasa berbenah dan mengadakan evaluasi secara berkala demi terwujudnya kinerja yang meningkat.

Semoga laporan Akuntabilitas ini bermanfaat bagi evaluasi dan peningkatan kinerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tasikmalaya, Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda



DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. BAB I.....	I-1
PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	I-1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	I-2
1.3 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA.....	I-3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	I-11
II. BAB II.....	II-1
PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	II-1
2.2 PERJANJIAN KINERJA	II-6
III. BAB III.....	III-1
AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	III-1
3.1.1 Sasaran 1.....	III-4
3.1.1 Sasaran 2.....	III-8
3.1.1 Sasaran 2.....	III-12
3.1.1 Sasaran 3.....	III-17
3.1.1 Sasaran 4.....	III-21
3.1.1 Sasaran 5.....	III-24
3.2 ANALISIS KINERJA.....	III-27
IV. BAB IV.....	IV-1
PENUTUP.....	IV-1
IV.1.1 4.1. Kesimpulan.....	IV-1
IV.1.2 4.2. Saran.....	IV-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Status Kepegawaian	I-4
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Jabatan	I-4
Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	I-7
Tabel 1. 4 Fasilitas Perhubungan yang Terpasang	I-7
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	I-8
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	II-5
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-6
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	II-7
Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	II-12
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	III-2
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	III-3
Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	III-32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.....	I-3
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya seperti tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 62 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi:

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:

1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.

d. Bidang Angkutan, terdiri atas:

1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
2. Seksi Jaringan Transportasi.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan
2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan.

f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:

1. Seksi Informasi Publik; dan
2. Seksi Komunikasi Publik.

g. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri atas:

1. Seksi Jaringan Infrastruktur;
2. Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika; dan
3. Seksi Persandian.

h. Bidang Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

1. UPTD Pengelola Terminal;

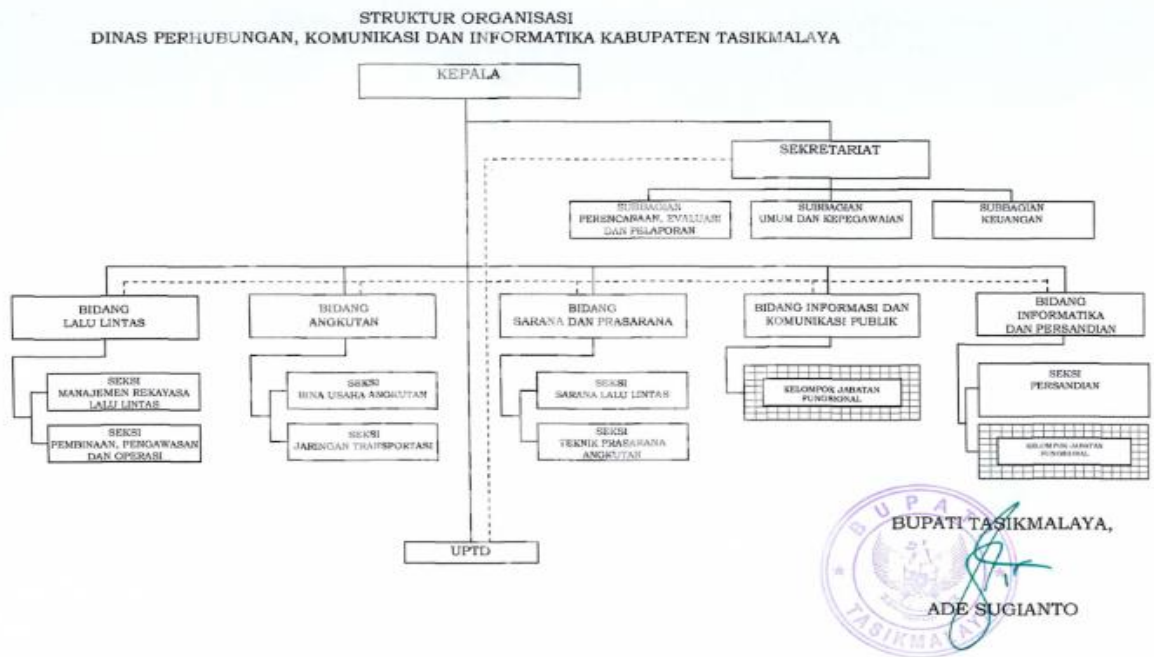


2. UPTD Pengelola Parkir;

3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

15

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 119 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



Gambar 1. 1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

1.3 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Aspek Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode bulan Desember 2025 sebanyak 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 140 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dengan keadaan sebagai berikut.



DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	56	14	70
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	6	0	6
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	132	8	140
Jumlah Total		194	22	216

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	5	1	6
3	Jabatan Pengawas	12	4	16
4	Jabatan Fungsional Penyetaraan	1	1	2
-	Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	1
-	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	0	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	9	2	11
-	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
-	PKB Penyelia	2	1	3
-	PKB Mahir	2	0	2
-	PKB Trampil	4	1	5
-	PKB Pemula	0	0	0



No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Jabatan Fungsional Umum	34	6	40
-	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0
-	Pengawas Lalu-Lintas darat	4	0	4
-	Pelaksana/Terampil – Pranata Komputer	3	0	3
-	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	1
-	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	0	1
-	Pengelola Dokumentasi	1	0	1
-	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
-	Pengolah Data	1	0	1
-	Pengadministrasi pengujian kendaraan bermotor	0	1	1
-	Pengelola Usaha Angkutan	0	1	1
-	Analisis Publikasi	0	1	1
-	Bendahara	1	0	2
-	Analisis Angkutan darat	2	0	2
-	Analisis Rekayasa Lalin	1	0	1
-	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	0	1
-	Pengadministrasi Keuangan UPTD PKB	1	0	1
-	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	1
-	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	1
-	Analisis Lalu Lintas	1	0	1
-	Perancang Grafis	1	0	1
-	Pengelola Terminal	2	0	2
-	Pengadministrasi Umum UPTD Terminal	1	0	1
-	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	0	1	1
-	Analisis Perizinan Transportasi	1	0	1



No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	0	1	1
-	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	1
-	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
-	Pengelola Retribusi Terminal	2	0	2
-	Pengadministrasi Umum UPTD PKB	1	0	1
-	Pengelola Situs atau Web	1	0	1
-	Pengelola Sarana Angkutan	0	1	1
-	Pengatur Lalu Lintas Jalan	2	0	2
Jumlah Total		62	14	76

2. Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya beserta sarana pendukungnya meliputi:

- a. Tanah, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya termasuk terminal dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut :



1. Daftar Inventaris Aset

Tabel 1. 3

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang/Sarana / Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR /RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2006	Dishubkominfo	Digunakan aktif
2	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2007	Dishubkominfo	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas	Sarana	46	Unit	4 Kurang Baik	1991-2024	Dishubkominfo	Digunakan aktif
4	Komputer / Laptop	Sarana	68	Unit	5 Rusak	2012-2024	Dishubkominfo	Digunakan aktif
5	Printer	Sarana	32	Unit	3 Rusak	2018-2024	Dishubkominfo	Digunakan aktif
6	Meja Kerja	Sarana	67	Buah	Baik	2007-2024	Dishubkominfo	Digunakan aktif
7	Kursi Kerja	Sarana	117	Buah	Baik	2007-2024	Dishubkominfo	Digunakan aktif
8	Meja Rapat	Sarana	1	Buah	Baik	2018	Dishubkominfo	Digunakan aktif
9	Kursi Rapat	Sarana	35	Buah	Baik	2019	Dishubkominfo	Digunakan aktif
10	AC	Sarana	20	Unit	Baik	2012-2019	Dishubkominfo	Digunakan aktif
11	Filing Kabinet	Sarana	22	Buah	Baik	2006-2019	Dishubkominfo	Digunakan aktif
12	Penghancur Kertas	Sarana	4	Unit	Baik	2018-2020	Dishubkominfo	Digunakan aktif
13	Kulkas	Sarana	1	Buah	Baik	2025	Dishubkominfo	Digunakan aktif

b. Kelengkapan Fasilitas Jalan

Kelengkapan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Kelengkapan fasilitas jalan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4

Fasilitas Perhubungan yang Terpasang

Uraian	Satuan	2024	2025	Jumlah kebutuhan	Persentase	Ket
Penerangan jalan Umum	Buah	5453	5471	24610	22,23%	Penambahan 18 titik
Rambu Rambu lalu lintas	Buah	1702	1756	7309	24,03%	Penambahan 54 titik



Uraian	Satuan	2024	2025	Jumlah kebutuhan	Persentase	Ket
Warning light dan traffict light	Buah	11	11	72	15,28%	0
Marka Jalan	meter	–	–	–	–	–
Guadrail	meter	588	588	4044	14,54%	0

Kesimpulan dari kondisi sarana prasarana perhubungan pada tabel diatas adalah jumlah kebutuhan fasilitas perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya.

- c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji kir harus dalam kondisi yang baik, karena hasil uji kir akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji kir juga memberikan konstribusi pendapatan daerah.

Tabel 1. 5

Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Nama Sarana	Jumlah Unit	Jumlah Unit	ket
		2024	2025	
1	Gedung Pengujian	1	1	
2	Menara air dan Pompa	-	-	
3	Ruang Pemeriksaan	1	1	
4	Ruang Administrasi	1	1	
5	Ruang Konsumen	1	1	
6	Ruang Generator	1	1	
7	Ruang Sarana dan Prasarana	1	1	
8	Alat Uji Asap (Smoke Tester)	1	1	



No.	Nama Sarana	Jumlah Unit	Jumlah Unit	ket
		2024	2025	
9	Alat Uji Under Car, Lorong Uji dan fly detector	1	1	
10	Alat uji Side Slip	1	1	
11	Alat uji Lampu utama	1	1	
12	Alat uji Berat dan alat uji Rem	1	1	
13	Alat uji Speedo meter / kecepatan	1	1	
14	Alat uji kebisingan	1	1	
15	Alat kegelapan kaca (tin Tester)	1	1	
16	Alat Ukur Dimensi	1	1	
17	Bank	1	1	

1.3 ISU AKTUAL

Yang menjadi Isu Aktual Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Persandian pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kejadian kecelakaan angkutan umum yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Belum tersedianya pelayanan secara elektronik sebagai penunjang pelayanan bidang angkutan;
3. Perusahaan angkutan umum di Kabupaten Tasikmalaya belum ada yang menerapkan sistem manajemen keselamatan angkutan;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan sarana/parasana fasilitas terminal tipe c;



5. Tidak adanya Fasilitas kelengkapan pendukung untuk melaksanakan perhitungan Kinerja Ruas Jalan;
6. Kurang optimalnya kegiatan pemeliharaan maupun pemasangan PJU karena mobil crane yang dimiliki hanya 1 (satu) unit sehingga mobilitas sangat terbatas;
7. Banyaknya Disinformasi dan Berita Hoaks;
8. Pentingnya Keamanan Data dan Privasi;
9. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi di saat krisis;
10. Peran Influencer dalam Komunikasi Publik dalam membentuk opini publik;
11. Komunikasi Publik yang berhubungan dengan Politik Identitas dan Polarisasi Sosial;
12. Keterbukaan Informasi Publik yaitu adanya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan;
13. Terjadinya Transformasi media tradisional ke media digital yang sangat cepat (Revolusi Media) serta Konsumsi Informasi oleh masyarakat melalui berbagai platform;
14. Perlunya Pengembangan JIP sebagai sarana komunikasi internal pemerintah, sebagai layanan akses internet, komunikasi data antar SKPD;
15. Dibutuhkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi (data center, backup dan dan Kelistrikan serta pendingin ruangan data center);
16. Perlunya peningkatan keamanan informasi mulai dari pembentukan CISRT dan peningkatan infrastruktur keamanan informasi;
17. Peningkatan SDM (Prakom), Sandiman dan Manggala Informatika;
18. Perlu disusunnya pedoman pelaksanaan layanan domain resmi pemerintah (go.id) terhadap aplikasi berbasis web;
19. Perlunya penerapan Integrasi data melalui teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada



aplikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

20. Tidak adanya ruang Laktasi, Fasilitas Difabel, Ruang Tunggu yang nyaman pada Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Tidak adanya Konsultasi dan Banding Pengujian Kendaraan Bermotor;
22. Tidak adanya Unit Kendaraan Uji Keliling;
23. Perlu adanya perbaikan secara bertahap fasilitas Terminal Tipe C;
24. Banyak Perusahaan angkutan yang tidak memanfaatkan fasilitas terminal yang tersedia;
25. Optimalisasi terminal untuk tempat melaksanakan Ram Cek, pengujian kendaraan bermotor dan marka area parkir untuk membantu peningkatan PAD.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, Isu Aktual dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang dan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupati Tasikmalaya Tahun 2025.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025. Membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan maupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta menguraikan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. VISI dan MISI Kabupaten Tasikmalaya

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus di bawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/organisasi, dan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.



Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

Pada tahun 2021 yang menjadi tahun transisi Renstra akhir tahun 2016-2021 dan menjadi awal mula disusunnya Renstra terbaru tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Visi dan Misi kabupaten Tahun 2021-2026, maka Visi yang akan dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya merupakan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“DENGAN SEMANGAN GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) misi:

- *Misi Pertama*, Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkeperibadian dan berakhlakul karimah. Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
- *Misi Kedua*, Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.
- *Penyelenggaraan pemerintahan* yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
- *Misi Ketiga*, Mewujudkan pemerintahan yang melayani melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.



- Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- Misi ke 4 yaitu Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global. Pada misi 4, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam periode 2021 -2026 yaitu Tujuan 4 Meningkatkan Investasi daerah. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Sasaran 8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif serta dalam mewujudkan Misi 2 dan Misi 4 pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional” serta “ Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama local, Nasional, Regional dan Global”.

a) Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5



(lima) tahun. Dengan Tujuan organisasi dapat mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada Isu-isu strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Tingkat pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	52,5	53,7	55,4	57,1	58,3	59,5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	20,10	50,30	50,50	50,70	50,90
									Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	prosentase ingkat keselamatan jalan	80,10	80,40	80,80	81,20	81,58	82,00
										Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00	37,00
2	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informatika dan persandian yang optimal	Indeks SPBE	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
									Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	40%	50%	60%	70%	75%	80%
									Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	II	II	II	III	III	IV



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk menguraikan target kinerja yang hendak dicapai, dengan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Tingkat keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya diukur target kinerja pada tingkat sasaran strategis dan target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2025 untuk pengukuran efesiensi dan efektifitas kegiatan. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,00 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Prosentase tingkat keselamatan jalan	82,27%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	35,00%
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4
3	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3 Poin
4	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70%
5	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	III

Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menetapkan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	39.613.916.181,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39.613.916.181,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.616.269.181,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.590.453.981,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.094.600,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.870.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.300.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.924.400,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.141.909.583,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.141.909.583,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.869.798,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.094.898,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	414.274.900,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	26.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.540.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	21.600.880.000,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.660.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.040.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	615.220.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.820.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.025.815.200,00	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota	57.215.000,00	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	57.215.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.887.055.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	393.055.300,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.493.999.700,00	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	262.300.000,00	
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	139.210.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	123.090.000,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	69.304.200,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	69.304.200,00	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.419.000,00	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.229.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99.190.000,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	468.980.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	336.290.000,00	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	132.690.000,00	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.442.000,00	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	17.442.000,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	123.100.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	123.100.000,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26000000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	26.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.914.098.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.275.523.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.275.523.000,00	
	Relasi Media	579.685.000,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	51.570.000,00	
	Pelayanan Informasi Publik	43.000.000,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	249.708.000,00	
	Penyusunan Konten	351.560.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	638.575.000,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	638.575.000,00	
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	170.050.000,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	341.200.000,00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	16.600.000,00	
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	110.725.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	83.549.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	83.549.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.549.000,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.549.000,00	

Program-program diatas selanjutnya terbagi dari kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4
Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	39.613.916.181,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39.613.916.181,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.616.269.181,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.590.453.981,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.094.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.141.909.583,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.869.798,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.540.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.040.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.025.815.200,00	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	57.215.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.887.055.000,00	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	262.300.000,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	69.304.200,00	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.419.000,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	468.980.000,00	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.442.000,00	



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	123.100.000,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26000000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.914.098.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.275.523.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.275.523.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	638.575.000,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	638.575.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	83.549.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	83.549.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.549.000,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang bertujuan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Capaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tercermin dari capaian 5 Sasaran Strategis Renstra dan dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan hasil strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 mempunyai capaian kinerja sebagai berikut :



Tabel 3. 1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global					
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,00 Poin	82,64 Poin	93,91%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang berkeselamatan	Persentase tingkat keselamatan jalan	82,27%	91,85%	111,64%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	35,00%	40,64%	116,11%
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional					
3.	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3 Poin	4,4 Poin	133,33%
4.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70%	71,80%	102,57%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	Kategori III	Kategori II	66,67%

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 5 (lima) sasaran menunjukkan sebanyak 4 sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata



capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 104,04%.

Rekapitulasi kategori pencapaian sasaran berdasarkan persentase capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

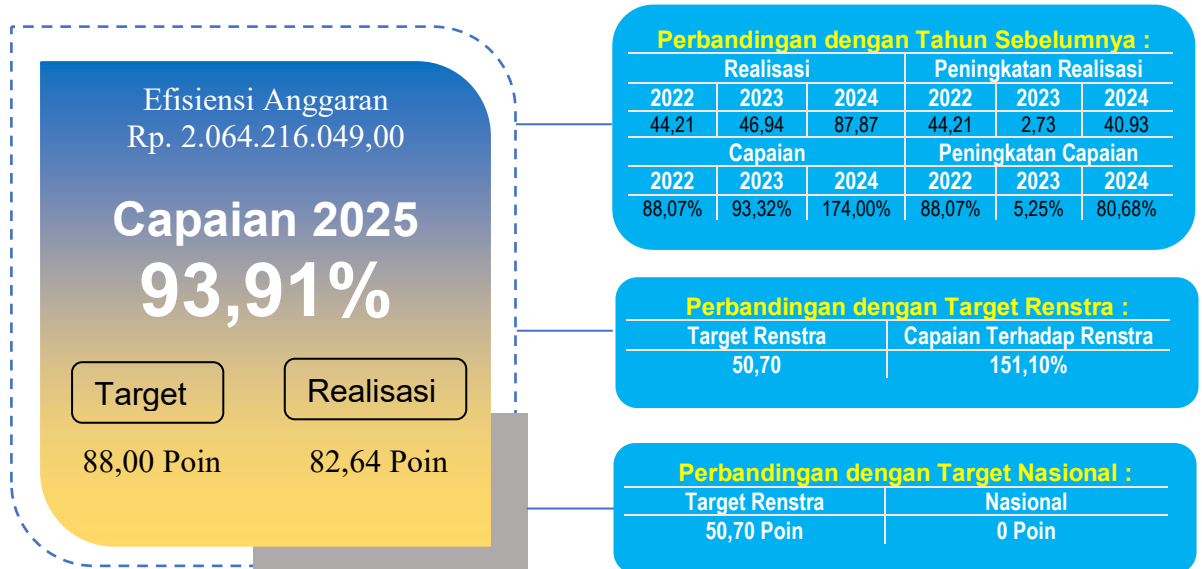
No	Kategori	Persentase capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	5
2	Tinggi	76% ≤ 90 %	0
3	Sedang	66% ≤ 75%	1
4	Rendah	51% ≤ 65%	-
5	Sangat Rendah	≤ 50%	-
Jumlah			6

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 2025 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah”

Indikator Kinerja ke-1: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2025 ditargetkan sebesar 88,00 poin. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat melalui Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat) dengan total nilai yang diperoleh 82,64 poin kategori “B” (Baik). Capaian kinerja yang diperoleh yaitu 93,91%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah di Tahun 2021 tidak ditargetkan, pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Mulai dilakukan pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2022 adalah 44,21 poin kategori “C” (Buruk) dari target yang ditetapkan sebesar 50,20 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 88,07%. Selanjutnya Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2023 adalah 46,94 poin kategori “C” (Buruk) dari target yang ditetapkan sebesar 50,30 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 93,32%. Adapun Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2024 adalah 87,87 poin kategori “A” (Sangat Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 50,50,00 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 174,00%. Adapun Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2025 adalah 82,64 poin kategori “B” (Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 88,00 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 93,91% sebagaimana infografis di atas.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Untuk Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar 82,64 Poin dan sampai dengan akhir renstra di tahun 2025 ditargetkan dapat tercapai dengan nilai 50,70 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka telah jauh terlampaui yaitu sebesar 162,99%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi

Secara fungsi Dishubkominfo berada dibawah Kementerian Perhubungan RI sehingga kami membandingkan nilai reformasi birokrasi Dishubkominfo Tahun 2025 dengan Provinsi Jawa Barat, untuk realisasi RB Dishubkominfo pada tahun 2025 sebesar 82,64 Poin sedangkan target RB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 muncul nilai dengan kategori “A”

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Hasil penilaian indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat melalui Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat) dengan total nilai yang diperoleh 82,64 poin dengan capaian kinerja sebesar 93,91%. Beberapa faktor ataupun penyebab penurunan kinerja Nilai Reformasi Birokrasi tersebut antara lain :



1. Penyederhanaan Indikator penilaian Reformasi Birokrasi dari

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global								
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	91,43%	33.590.453.981	31.526.237.932	2.064.216.049	93,85%	6,15%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan belum tercapai. Pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Dishubkominfo telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yaitu sebesar 91,43%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar Rp. 2.064.216.049,00 dari alokasi anggaran Rp. 33.590.453.981,00 target indikator belum tercapai.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP, Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu, dan Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan yang dapat mendongkrak penilaian RB Perangkat Daerah dalam hal peningkatan akuntabilitas dan pelayanan Perangkat Daerah. Sehingga realisasi nilai RB pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 91,43%. Dimana Program ini terdiri dari beberapa kegiatan termasuk sub kegiatan di bawahnya yaitu *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat*

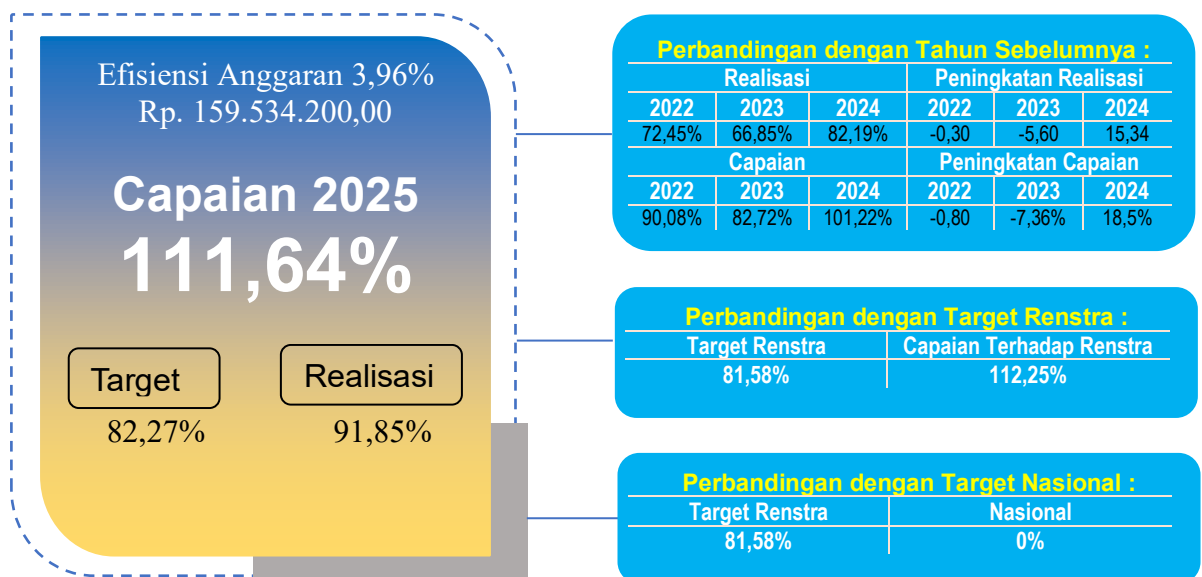


Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah , Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.1.1 Sasaran 2

“ Meningkatkan Pelayanan Perhubungan yang berkeselamatan”

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Tingkat Keselamatan Jalan



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,27%. Adapun realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan tahun 2025 adalah sebesar 91,85%. Hasil tersebut melebihi target



yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 111,64%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2025 dengan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2025 dari target kinerja sebesar 82,27% realisasi kinerja sebesar 91,85% dengan capaian sebesar 111,64%. Untuk tahun 2022 dari target kinerja sebesar 80,43% realisasi kinerja sebesar 72,45% dengan capaian sebesar 90,08%. Selanjutnya Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 80,81% realisasi sebesar 66,85% dengan capaian sebesar 82,27%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 81,20% realisasi sebesar 82,19% dengan capaian sebesar 101,22%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2025 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2025. Realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2025 adalah sebesar 91,85% sedangkan target akhir tahun renstra Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah sebesar 81,58% sehingga capaian kinerja Tahun 2025 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 112,25%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara fungsi Dishubkominfo pada urusan perhubungan berada dibawah Kementerian Perhubungan RI sehingga kami membandingkan kinerja Persentase Tingkat



Keselamatan Jalan Dishubkominfo Tahun 2025 dengan Kementerian Perhubungan RI, untuk realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Dishubkominfo Tahun 2025 sebesar 91,85% sedangkan target Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2025 sebesar 85,00% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Dishubkominfo Tahun 2025 melebihi standar Kementerian Perhubungan RI.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2025 antara lain :

1. Adanya Pemasangan perlengkapan jalan yg tersebar di Ruas Jalan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Tasikmalaya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global								
2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Persentase tingkat keselamatan jalan	111,64%	4.025.815.200	3.866.281.000	159.534.200	96,04%	3,96%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Persentase Tingkat Keselamatan Jalan, Dishubkominfo pada Tahun 2025 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 111,64%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada



alokasi anggaran sebesar 3,96% atau Rp. 159.534.200,00 dari alokasi anggaran Rp. 4.025.815.200,00 target indikator telah terlampaui.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

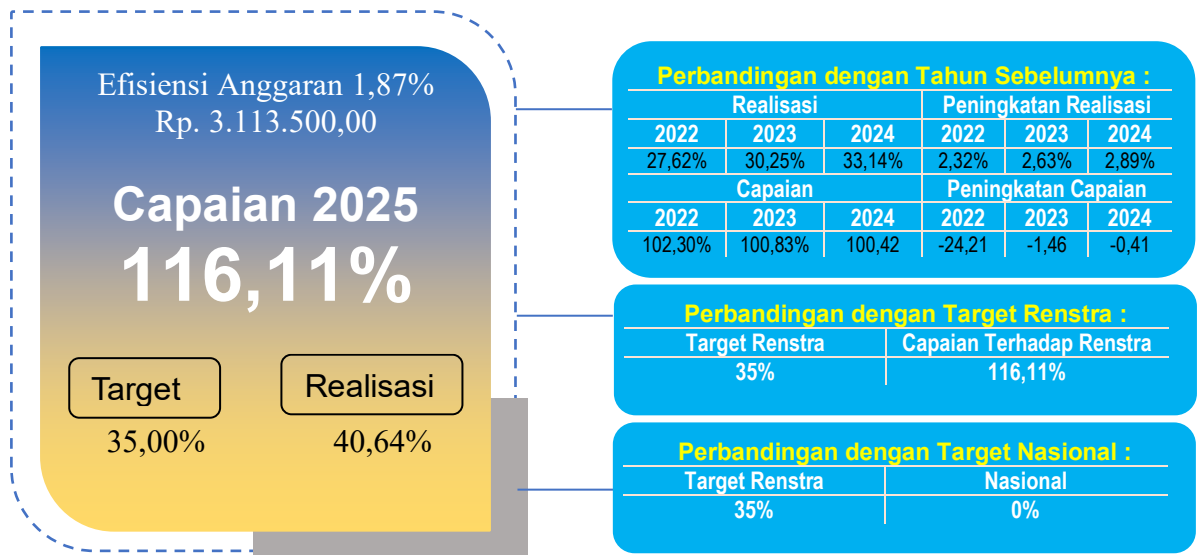
Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan kegiatan terdiri dari *Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya, kegiatan *Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir* beserta sub kegiatannya, kegiatan *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* beserta sub kegiatannya, dan *Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya.



3.1.1 Sasaran 2

“ Meningkatkan Pelayanan Perhubungan yang berkeselamatan”

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan tahun 2025 ditargetkan sebesar 35,00%. Adapun realisasi Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan tahun 2025 adalah sebesar 40,64%. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 116,11%.



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2025 dengan Tahun 2022 sampai dengan 2025. Pada Tahun 2025 dari target kinerja sebesar 35,00% realisasi kinerja sebesar 40,64% dengan capaian sebesar 116,11%. Untuk Tahun 2022 dari target kinerja sebesar 27,00% realisasi sebesar 27,62% dengan capaian sebesar 102,30%. Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 30,00% realisasi sebesar 30,25% dengan capaian sebesar 100,83%. Selanjutnya Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 33% realisasi kinerja sebesar 33,14% dengan capaian sebesar 100,42%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2025 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2025. Realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2025 adalah sebesar 40,64% sedangkan target akhir tahun renstra Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan adalah sebesar 35,00% sehingga capaian kinerja Tahun 2025 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 116,11%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara fungsi Dishubkominfo pada urusan perhubungan berada dibawah Kementerian Perhubungan RI sehingga kami membandingkan kinerja Persentase Pengguna Moda



Transportasi Umum di Perkotaan Dishubkominfo Tahun 2025 dengan Kementerian Perhubungan RI, untuk realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Dishubkominfo Tahun 2025 sebesar 40,64% sedangkan target Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2025 sebesar 39,83% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Dishubkominfo Tahun 2025 tercapai dari standar Kementerian Perhubungan RI sehingga perlu upaya ekstra untuk mengimbangi standar Kementerian Perhubungan RI.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pemilihan moda transportasi tergantung dari beragam faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan moda transportasi tersebut diantaranya, ciri pengguna, ciri pergerakan dan ciri fasilitas transportasi. Ciri pengguna tergantung pada individu pengguna moda transportasi, seperti struktur rumah tangga, kepemilikan moda transportasi dan tingkat pendapatan. Ciri pergerakan sangat dipengaruhi oleh tujuan pergerakan, waktu pergerakan, dan jarak juga waktu perjalanan. Ciri fasilitas sangat tergantung pada keandalan moda transportasi, efektivitas perjalanan, ketersediaan ruang dan keamanan juga kenyamanan. Analisis persentase pengguna moda transportasi dapat dilakukan dengan menghitung jumlah pengguna moda transportasi tertentu dan membandingkannya dengan jumlah penduduk. Penyebab keberhasilan atau peningkatan



kinerja pada indikator Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2025 antara lain :

- a. Mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh angkutan umum, seperti kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan;
- b. Pelaksanaan survey
 - 1) mengetahui pola perjalanan, preferensi moda transportasi, dan masalah yang dihadapi pengguna;
 - 2) wawancara langsung atau pengisian kuesioner oleh responden di terminal kepada pengemudi dan pengguna layanan angkutan umum;
- c. Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas angkutan umum
- d. Integrasi dan Konektivitas:
 - 1) Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi sehingga memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan;
 - 2) Meningkatkan konektivitas antar moda transportasi dengan jaringan-jaringan trayek angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan perbatasan. Selain itu juga terdapat jaringan trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota antar Provinsi (AKAP);
- e. Penggunaan teknologi dengan aplikasi Sistem Ngokolakeun Tarekah Izin Angkutan (SANGHIANG) yang bertujuan untuk :
 - 1) Mengetahui informasi mengenai perizinan
 - 2) Mengetahui informasi laik jalan kendaraan



Kebijakan dan Regulasi dengan Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penggunaan angkutan umum, seperti pembatasan kendaraan pribadi sesuai dengan aturan standar pelayanan minimal untuk angkutan umum dan penerapan tarif tidak melebihi batas atas dan batas bawah.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global								
2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	116,11%	166.542.000	163.428.500	3.113.500	98,13%	1,87%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan, Dishubkominfo pada Tahun 2025 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 116,11%. Efisiensi yang dilakukan yaitu sekitar 1,87% atau Rp. 3.113.500,00 dari alokasi anggaran Rp. 166.542.000,00 secara keseluruhan target indikator bisa tercapai bahkan terlewati.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan kegiatan terdiri dari *Pengelolaan Terminal Penumpang Type C* beserta sub kegiatannya, dan *Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya, *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Audit dan*

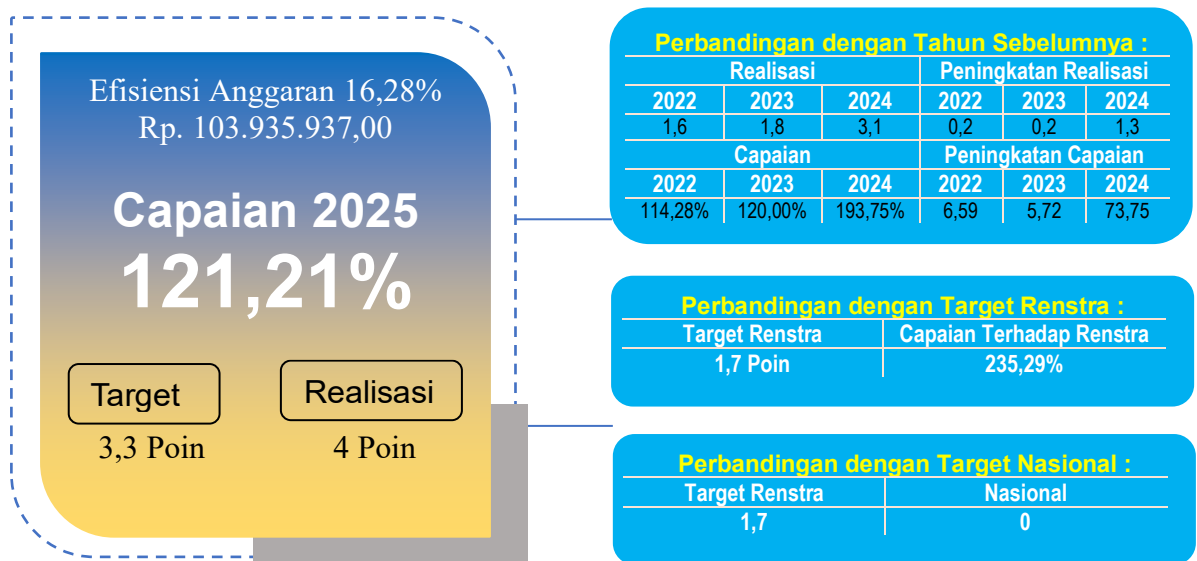


Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Sasaran 3

“Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE”

Indikator Kinerja ke-4 : Indeks Domain Tata Kelola SPBE



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,3 poin. Adapun realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2025 adalah sebesar 4 poin. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 121,21%.



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2025 dengan Tahun 2022 sampai dengan 2025. Pada Tahun 2025 dari target kinerja sebesar 3,3 Poin realisasi kinerja sebesar 4 Poin dengan capaian sebesar 121,21%. Untuk tahun 2022 dari target kinerja sebesar 1,4 Poin realisasi kinerja sebesar 1,6 Poin dengan capaian sebesar 114,28%. Selanjutnya Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 1,5 Poin realisasi sebesar 1,8 Poin dengan capaian sebesar 120,00%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 1,6 Poin realisasi sebesar 3,1 Poin dengan capaian sebesar 193,75%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2025 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2025. Realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2025 adalah sebesar 4 Poin sedangkan target akhir tahun renstra Indeks Domain Tata Kelola SPBE adalah sebesar 1,7 Poin sehingga capaian kinerja Tahun 2025 terhadap akhir tahun renstra 2025 adalah sebesar 235,29%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Dishubkominfo Tahun 2025 dengan realisasi Indeks Domain Tata Kelola SPBE Nasional dapat kita lihat pada infografis di atas. Realiasi kinerja Indeks



Domain Tata Kelola SPBE Dishubkominfo tahun 2025 sebesar 4 Poin sedangkan target Indeks Domain Tata Kelola SPBE secara nasional pada tahun 2025 sebesar 3,23 poin meskipun nilai domain tata kelola secara nasional belum dirilis secara eksplisit. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Dishubkominfo Tahun 2025 melampaui realisasi Indeks Domain Tata Kelola SPBE nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2025 antara lain :

1. Kerja tim work untuk memenuhi semua eviden yang dirasa masih banyak kekurangan, sehingga adanya perubahan-perubahan yang dilakukan untuk memenuhi kriteria setiap indikator penilaian SPBE, khususnya di domain satu untuk Indikator Kebijakan dan domain 4 untuk Layanan.
2. Inovasi perubahan kinerja dari setiap SKPD menjadi pendorong untuk perubahan eviden SPBE yang signifikan;
3. Adanya tambahan sumberdaya manusia khusus bidang TIK;
4. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait penilaian SPBE;
5. Peningkatan Kolaborasi sistem penghubung layanan pemerintah;
6. Aplikasi yang saling terintegrasi.

Adapun nilai peningkatan evaluasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2025 diperoleh dari Domain 1



yaitu Indikator Kebijakan, domain 2 untuk Tata Kelola dan Domain 4 untuk Layanan Publik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	121,21%	638.575.000	534.639.063	103.935.937	83,72%	16,28%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2025 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 121,21%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 16,28% atau Rp. 103.935.937,00 dari alokasi anggaran Rp. 638.5775.000,00 target indikator telah terlampaui.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja *Persentase Program Pengelolaan Aplikasi Informatika* dengan kegiatan terdiri dari *Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya. Beberapa hal lainnya yang diperlukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah Peningkatan kinerja pegawai melalui Bimbingan Khusus TIK, Pengembangan Fungsional Prakom yang jelas di setiap Perangkat Daerah, Pembinaan yang berkelanjutan terkait

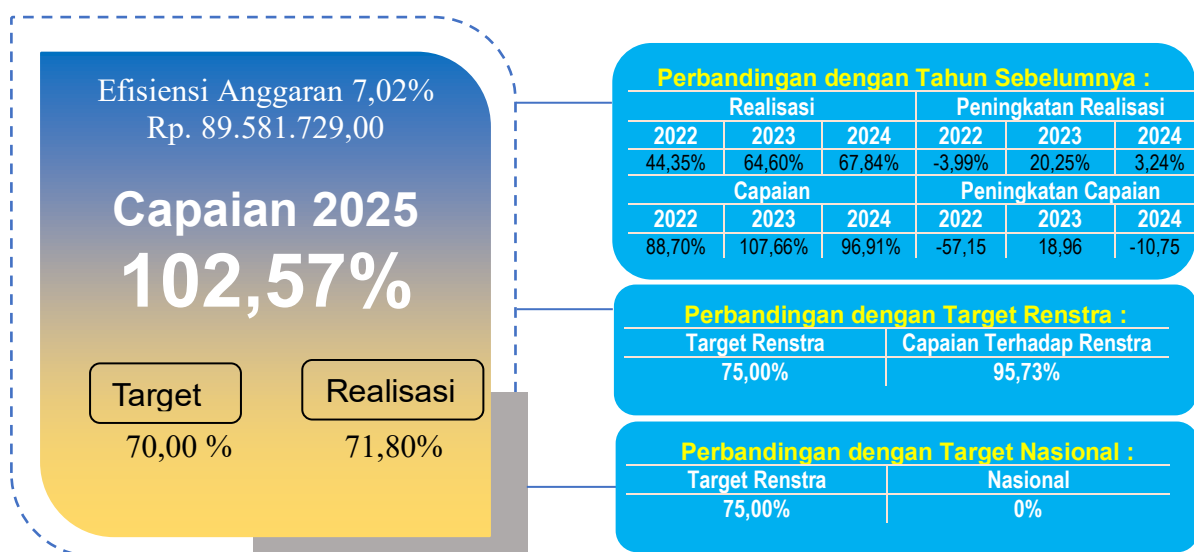


SPBE untuk semua Perangkat Daerah, dan Evaluasi terhadap keberhasilan nilai SPBE Perangkat Daerah.

3.1.1 Sasaran 4

“ Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik”

Indikator Kinerja ke-5 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 ditargetkan sebesar 70,00%. Adapun realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 adalah sebesar 71,80% dengan kualifikasi “cukup informatif”. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 102,57%.



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2025 dari target kinerja sebesar 70,00% realisasi kinerja sebesar 71,80% dengan capaian sebesar 102,57%. Untuk tahun 2022 dari target kinerja sebesar 50% realisasi kinerja sebesar 44,35% dengan capaian sebesar 88,70%. Selanjutnya Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 60% realisasi sebesar 64,60% dengan capaian sebesar 107,66%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 70% realisasi sebesar 67,84% dengan capaian sebesar 96,91%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2025. Realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 adalah sebesar 71,80% sedangkan target akhir tahun renstra Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah sebesar 75,00% sehingga capaian kinerja Tahun 2025 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 95,73%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo Tahun 2025 dengan realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nasional dapat kita lihat pada infografis di atas. Realiasi kinerja



Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo tahun 2025 sebesar 71,80% sedangkan Skor Nilai Keterbukaan Informasi Publik secara nasional pada tahun 2025 sebesar 66,43. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo Tahun 2025 melebihi skor Nasional

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Melihat realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo Tahun 2025 tercapai,

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	102,57%	1.275.523.000	1.185.941.271	89.581.729	92,98%	7,02%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yaitu sebesar 102,57%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 7,02% atau Rp. 89.581.729,00 dari alokasi anggaran Rp. 1.275.523.000,00 target tercapai.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah



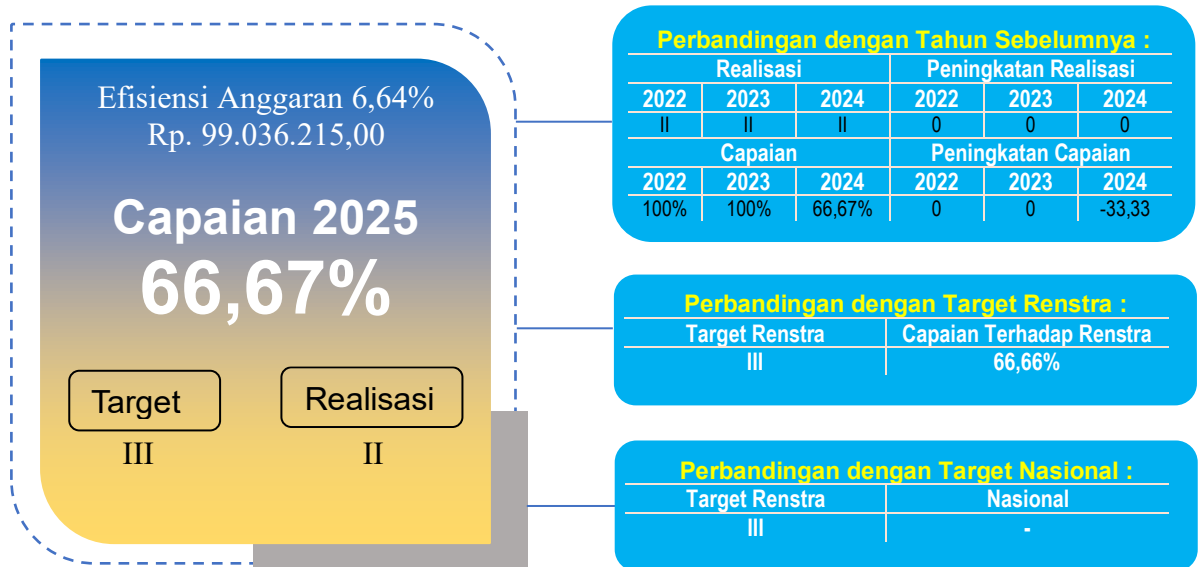
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beserta sub kegiatannya.

3.1.1 Sasaran 5

“Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Penerapan Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Indikator Kinerja ke-6 : Indeks KAMI



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks KAMI tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Indeks KAMI tahun 2025 ditargetkan pada Tingkat Kematangan Level III. Adapun realisasi kinerja Indeks KAMI tahun 2025 adalah pada Tingkat Kematangan Level II yang didefinisikan “Penerapan Kerangka Kerja Dasar”. Hasil tersebut masih dibawah



target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 66,67%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks KAMI Tahun 2025 dengan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pada Tahun 2025 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level III* realisasi kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 66,67%. Untuk tahun 2022 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* realisasi kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 100,00%. Selanjutnya Tahun 2023 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* realisasi pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 100,00%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2024 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level III* realisasi pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 66,67%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Indeks KAMI Tahun 2025 dengan target akhir tahun renstra yaitu Tahun 2025. Realisasi kinerja Indeks KAMI Tahun 2025 adalah pada *Tingkat Kematangan Level II* sedangkan target akhir tahun renstra Indeks KAMI adalah pada *Tingkat Kematangan Level III* yang didefinisikan " Terkelola dan Terukur" sehingga capaian kinerja Tahun 2025 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar **66,66%**.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional



Perbandingan kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional di Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya tidak ada.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	66,67%	83.549.000	81.067.225	2.481.775	97,03%	2,97%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan belum berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Indeks KAMI Tahun 2025 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu pada *Tingkat Kematangan Level II* yang didefinisikan dengan "Terdefinisi dan Konsisten". Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 2,97% atau Rp. 2.481.775,00 dari alokasi anggaran Rp. 83.549.000,00 target belum tercapai.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Melihat realisasi kinerja Indeks KAMI Dishubkominfo Tahun 2025 terdapat ketidaktercapaian target, realisasi masih tetap sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada *Tingkat Kematangan Level II* yang didefinisikan dengan "Penerapan Kerangka Kerja Dasar". Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Indeks KAMI Tahun 2025 antara lain :

1. Urusan persandian masih dianggap kurang penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;



2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi yaitu tenaga Sandiman;
3. Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Adapun alternatif solusinya antara lain adalah :

1. Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran;
2. Melakukan kerja sama dengan akademisi yang memiliki kemampuan keamanan siber;
3. Dilakukan tahap persiapan dalam penyusunan dokumen SMKI dengan meminta informasi kepada Kementerian, provinsi Jawa Barat dan daerah lain.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks KAMI adalah *Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi* dengan kegiatan *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatan *Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

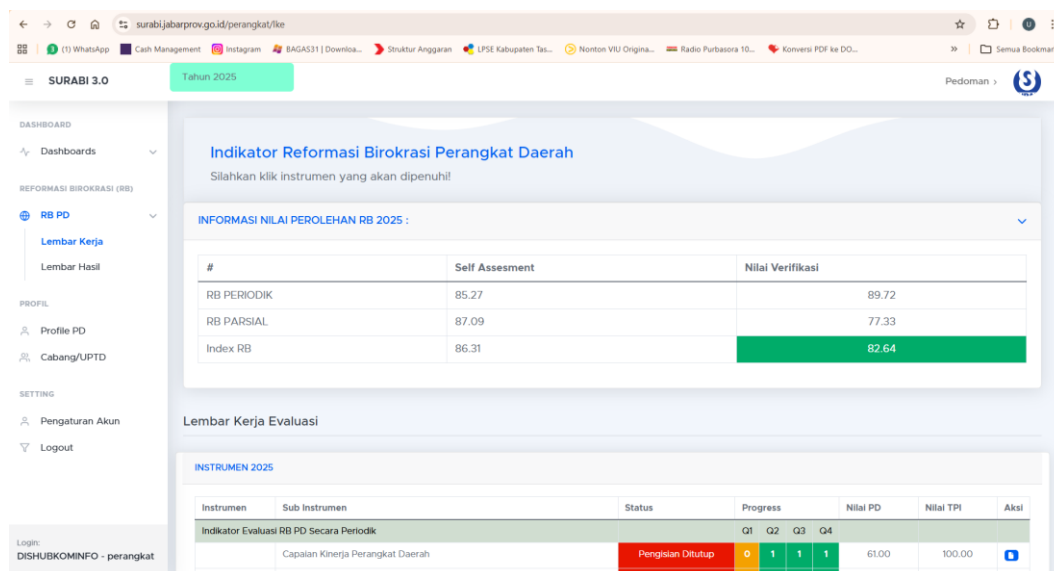
3.2 ANALISIS KINERJA

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 – 2026 dengan misi 2 dan misi 4 dalam Renstra Perangkat Daerah dapat terealisasi sesuai dengan Target sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

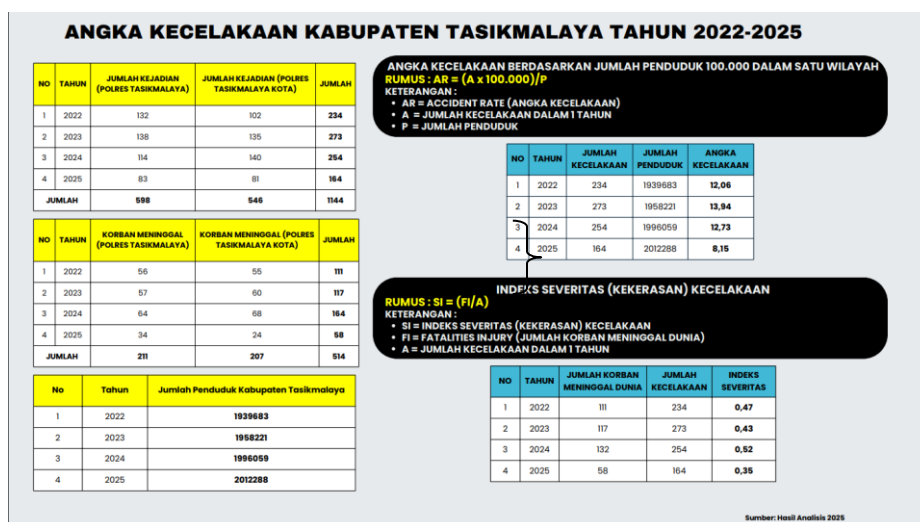


Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebesar 82,64 Poin dari target 88,00 Poin. Hal ini di buktikan dengan gambar di bawah ini :



2. Prosentase tingkat Keselamatan Jalan

Tingkat keselamatan jalan pada Tahun 2025 sebesar 91,85% dari target 82,27% data sementara sampai bulan Agustus Tahun 2025 berikut perhitungannya :



3. Prosentase Pengguna moda Transportasi umum di perkotaan

Pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah sebesar 33,89 % dari target sebesar 33,00 %.

Jumlah Rata-rata Penumpang pada Tahun n
jumlah kapasitas penumpang pada 4 Tipe Kendaraan Angkum



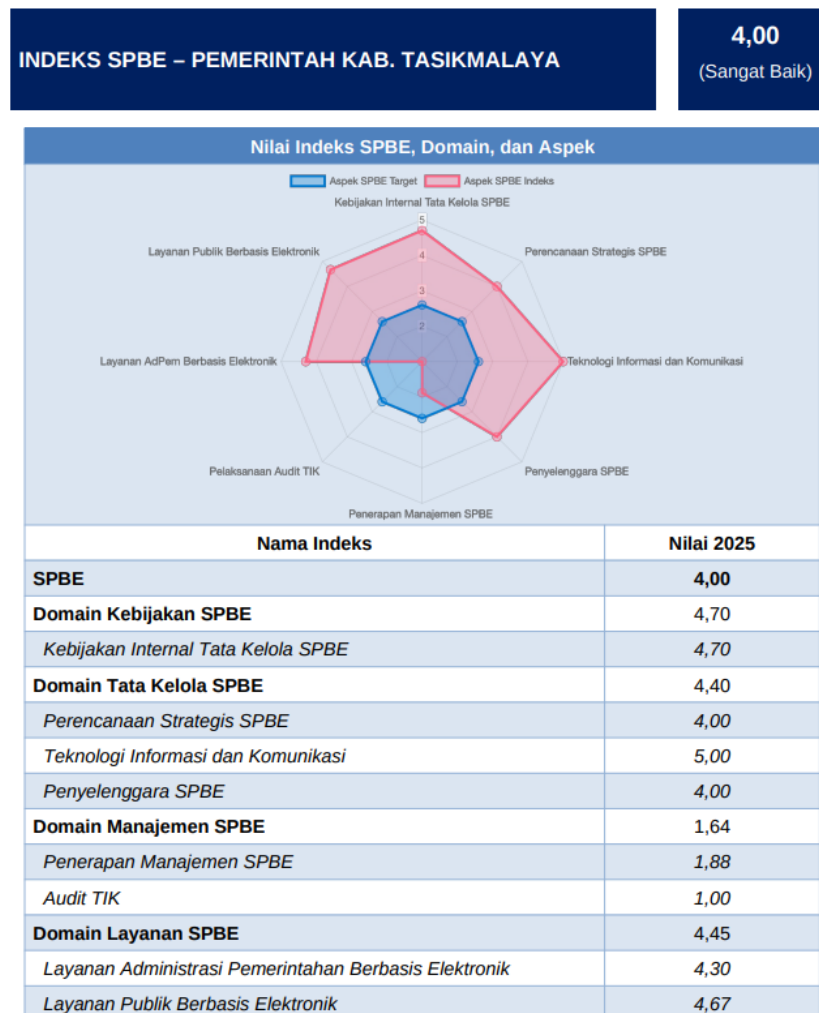
$$= \frac{817.868}{2.012.288} = 0,406437 \times 100 = 40,64\%$$

4. Indeks Domain Tata Kelola SPBE pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengacu PP No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Keputusan MenPANRB No. 663 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasilnya mencapai nilai 4 Poin hal ini di buktikan dengan gambar di bawah ini :

Informasi penilaian SPBE

Berdasarkan Monev yang dilaksanakan hasil peniliannya bisa dilihat dari website tauval.spbe.go.id.

Cara perhitungan indeks Domain Tata Kelola SPBE sebagai



berikut :



DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Cara Perhitungan	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	menggunakan Rumus penilaian pada Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$	poin	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 Penilaian yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 006/SK/KI-JBR/XI/2025 tentang Hasil Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari semula Tahun 2024 sebesar 96,91% menjadi 102,57% pada tahun 2025 dari target 70%, untuk daftar penilaian sebagai berikut :

18	Pemerintah Kabupaten Majalengka	90	INFORMATIF
19	Pemerintah Kabupaten Cirebon	90	INFORMATIF
20	Pemerintah Kota Tasikmalaya	78	CUKUP INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	71,8	CUKUP INFORMATIF
22	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	71,08	CUKUP INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Garut	70,48	CUKUP INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Bogor	69,32	CUKUP INFORMATIF
25	Pemerintah Kabupaten Cianjur	67,96	CUKUP INFORMATIF
26	Pemerintah Kabupaten Indramayu	67,32	CUKUP INFORMATIF
27	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	42,68	KURANG INFORMATIF



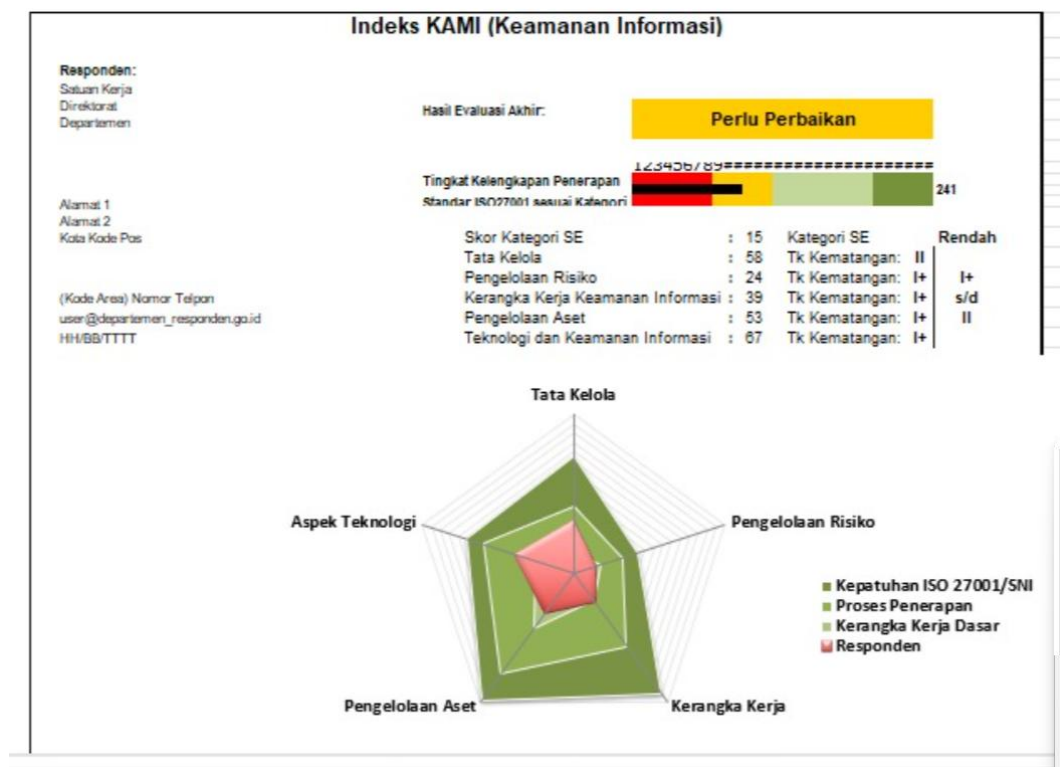
Informasi nilai keterbukaan informasi public didapat sementara dari WhatsApp karen dari website (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mendapat peringkat yang cukup baik, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meraih predikat *cukup informatif*.

Cara perhitungan Nilai Keterbukaan Informasi Publik menggunakan Instrumen Penilaian Kominsi Informasi tentang Monitoring dan evaluasi Penerapan Keterbukaan dapat diakses melalui (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>)

6. Indeks KAMI

Pada Tahun 2025 Capaian Indek KAMI hanya pada kategori II, belum sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu pada kategori III. Adapun untuk penilaian Indeks KAMI, menggunakan instrumen penilaian yang dapat dilihat pada (<https://bssn.go.id/indeks-kami/>)



3.1 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menangani 3 Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan Urusan tersebut, untuk memenuhi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 39.613.916.181,00 yang terdiri dari anggaran belanja Operasi berupa belanja pegawai sebesar Rp. 9.141.909.583,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 29.867.534.598,00 serta belanja modal sebesar Rp. 604.472.000,00 yang diselenggarakan dalam 5 program, 18 kegiatan serta 38 sub kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL PAGU				39.613.916.181	37.194.166.491	93,89
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.616.269.181	35.392.518.932	94,09
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.590.453.981	31.526.237.932	93,85
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.094.600	66.731.450	90,06
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.141.909.583	8.418.730.087	92,09
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	100,00
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.869.798	1.050.057.738	96,26
			5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.540.000	21.217.531.011	94,30
			6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.040.000	738.187.646	98,68
	Meningkatnya Pelayanan	Persentase tingkat	PROGRAM	4.025.815.200	3.866.281.000	96,04



DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
	perhubungan yang berkeselamatan	keselamatan jalan	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			7 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	57.215.000	53.000.000	92,63
			8 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.887.055.000	2.833.786.500	98,15
			9 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	262.300.000	167.958.000	64,03
			10 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	69.304.200	69.224.000	99,88
			11 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.419.000	110.379.000	96,47
			12 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	468.980.000	468.505.000	99,90
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			13 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.442.000	17.373.000	99,60
			14 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	123.100.000	120.755.500	98,10
			15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	26.000.000	25.300.000	97,31
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.914.098.000	1.720.580.334	89,89
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.275.523.000	1.185.941.271	92,98
			16 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.275.523.000	1.185.941.271	92,98
	Meningkatnya Kematanan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	638.575.000	534.639.063	83,72
			17 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	638.575.000	534.639.063	83,72
3	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	83.549.000	81.067.225	97,03
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	83.549.000	81.067.225	97,03
			18 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	83.549.000	81.067.225	97,03

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, Realisasi Belanja Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 37.194.166.491,00 atau 93,89% dari anggaran Rp. 39.613.916.181,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 36.597.656.265,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp. 39.009.444.181,00. Belanja Modal Terealisasi sebesar Rp. 596.510.226,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp. 604.472.000,00.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya laporan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Dishubkominfo Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2. Saran

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, yakni :

1. Sumberdaya manusia yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait ketersediaan anggaran pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan



kompetensi pegawai di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

2. Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

3. Penyusunan Grand Design penataan parkir di Kabupaten Tasikmalaya;

4. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi bagi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;

6. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perhubungan;

7. Berkoordinasi lebih komprehensif dengan SKPD Lainnya di Tingkat Kabupaten serta dengan Dinas/Kementerian terkait untuk Tingkat Provinsi dan Pusat;

8. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai sarana komunikasi internal pemerintah, layanan akses internet, dan komunikasi data antar SKPD;

9. Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi;

10. Peningkatan keamanan informasi mulai dari pembentukan CISRT dan peningkatan infrastruktur keamanan informasi;



11. Penerapan Integrasi data melalui teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada aplikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda



DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA